

¹Corresponding author

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Batik Surakarta
Jl. KH. Agus Salim No. 10
Surakarta, Indonesia, 57147
E-mail: enggarrwp@gmail.com

^{2,3}Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Batik Surakarta
Jl. KH. Agus Salim No. 10
Surakarta, Indonesia, 57147

Article info:

Received 16 July 2020

Accepted 26 July 2020

Available online 27 July 2020

Keywords: competency; controlling;
technology; participation; accountability

JEL Classification: H11, H41, H53, H83

DOI: <http://doi.org/10.32400/iaj.29261>



This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Enggar Wahyuning Pahlawan¹

Anita Wijayanti²

Suhendro³

Abstract

Accountability of village funds management is the responsibility of the village officers. Village officers should have good competency. Its can help village officer to manage village funds. Another thing in managing village funds besides of good internal controlling system is the use of information technology and public participation. This study aims to know the effect of competency of village officers, internal controlling system, use of information technology, and public participation on the accountability of village fund management. This study uses a quantitative approach for hypothesis testing. The instrument of this study is in the form of questionnaires and filled by respondents. The population in this study is all village officers in Sub-District of Grogol at Regency of Sukoharjo. The sampling technique of this study is purposive sampling with 40 respondents as the sample and analyzed by multiple linear regression. This study finds that the competency of village officers and public participation are significant on accountability of village funds management. Also, this study finds that internal controlling system and use of information technology are insignificant on accountability of village funds management.

Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak sekali pembangunan infrastruktur seperti yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia yaitu membangun desa untuk menjadikannya semakin maju dan berkembang dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pembangunan desa juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui APBD wajib untuk dikelola dengan baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur kepentingan dari masyarakat tersebut

berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Sebuah desa memiliki unsur penyelenggara yaitu pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan aparatur desa lainnya.

Salah satu tugas aparatur desa yaitu untuk mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa guna pembangunan desa dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi fokus penting bagi aparatur desa sebab hal ini menunjukkan tanggungjawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas juga dapat menunjukkan bahwa aparatur desa telah bekerja dengan benar, etis dan bertanggungjawab atas

pekerjaannya dalam mengelola dana desa. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur bagi aparatur desa atas tanggungjawab dalam pekerjaan mereka (Dewi dan Gayatri, 2019). Kompetensi yang dimiliki aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya.

Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang berkompeten dan sistem pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa mengingat dana yang disalurkan tersebut memiliki jumlah yang signifikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap Undang-Undang.

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah desa harus mampu melayani masyarakatnya dan mengelola dana desa dengan baik. Hal penting lainnya, aparatur desa harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat meningkatkan kinerja di berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Nuryanto, 2012:1-2).

Banyaknya jumlah program kerja desa menyebabkan para aparatur desa memerlukan partisipasi masyarakat dalam membantu aparatur desa melaksanakan pengelolaan dana desa yang baik. Secara ideal, aparatur desa pada dasarnya wajib menyampaikan informasi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa dan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk saran dan usulan atas penggunaan dana tersebut. Partisipasi masyarakat dapat meminimalisir

kemungkinan penyimpangan atas pengelolaan dana desa serta dapat mengurangi penggunaan atau pemanfaatan dana yang tidak tepat sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Tinjauan pustaka

Stewardship theory

Teori *stewardship* menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya (Donaldson dan Davis, 1991). Selain itu, pemerintah juga melakukan pekerjaannya atas motivasi kepentingan organisasi dan bukan termotivasi dari kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini juga dibuat atas dasar filosofi mengenai sifat yang dimiliki oleh manusia, dimana pada hakikatnya manusia mampu dipercaya dan memiliki tanggungjawab serta memiliki integritas yang baik, sehingga dalam hal ini pemerintah dipercaya sebagai seseorang yang melakukan tindakan yang baik untuk kepentingan bersama (Kaihatu, 2006). Implikasi teori ini adalah menggambarkan keberadaan pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam melayani masyarakat agar tujuan organisasi untuk masyarakat dapat tercapai dengan optimal (Budiana et al., 2019).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2004 tentang Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa. Hal ini dapat diartikan bahwa dana desa merupakan hak yang diperoleh desa dari pemerintah pusat untuk pembangunan desa dan aparatur

desa memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan tersebut dengan baik. Akuntabilitas yang baik ditunjukkan oleh adanya sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi handal, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu (Lestari et al., 2019). Akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya atau dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada aparatur desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Noordiawan, 2006:34).

Kompetensi aparatur desa

Sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan (Sutrisno, 2017:2). Terkait pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu pula sebaliknya (Umaira dan Adnan, 2019).

Sistem pengendalian internal

Pengendalian internal adalah sejumlah prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya (Hery, 2014:11-12). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008:135). Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat, dimana partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat karena tanpa adanya partisipasi masyarakat di setiap kegiatan maka pembangunan desa tidak akan tercapai dengan baik (Atiningsih dan Ningtyas, 2019). Masyarakat juga disebut sebagai pemangku kepentingan utama yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan kebijakan organisasi publik terutama implementasi pembangunan di desa-desa sehingga proses implementasi pembangunan tepat pada sasaran, efisien dan efektif (Wafirotn dan Septivastuti, 2019).

Hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis

Kompetensi aparatur desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Terkait pengelolaan dana desa, maka seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa maka hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya, jika aparatur desa tidak memiliki sumber

daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka akuntabilitas tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira dan Adnan, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Budiana et al. (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), Aulia et al. (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa maupun kompetensi aparatur pengelola dana desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dengan demikian, sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa sangat diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Budiana et al. (2019), dan Widyatama et al., (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008:135). Penelitian Aulia et al. (2018), dan Sugiarti dan Yudianto (2017)

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting karena masyarakat dapat memperoleh informasi tentang penyaluran dana untuk pembangunan desanya. Masyarakat bisa disebut juga pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan organisasi publik, terutama implementasi pembangunan di desa-desa. Implementasi pembangunan harus diprioritaskan dengan melibatkan masyarakat sehingga proses implementasi pembangunan tepat pada sasaran, efisien dan efektif (Wafirotin dan Septiviastuti, 2019). Atiningsih dan Ningtyas (2019), Aulia et al. (2018), Umaira dan Adnan (2019), dan Wafirotin dan Septiviastuti (2019) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Metode penelitian

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penerapan metode untuk menguji atau meneliti sebuah teori dengan cara menganalisis hubungan antar variabel melalui prosedur statistik (Noor, 2017:38). Data penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan skala tertentu.

Variabel penelitian dan pengukurannya

Variabel dependen penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa atau APDD (Y) yang diukur dengan menggunakan skala Likert, dimana setiap jawaban memiliki skor berikut: Skor 1 untuk

jawaban “Sangat Tidak Setuju (STS)”, Skor 2 untuk jawaban “Tidak Setuju” (TS), Skor 3 untuk jawaban “Netral (N)”, Skor 4 untuk jawaban “Setuju (S)”, dan Skor 5 untuk jawaban “Sangat Setuju (SS)”. Variabel independen penelitian ini adalah Kompetensi Aparatur Desa atau KAD (X1), Sistem Pengendalian Internal atau SPI (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi atau PTI (X3), dan Partisipasi Masyarakat atau PM (X4) yang diukur dengan menggunakan skala Likert, dimana setiap jawaban memiliki skor berikut: Skor 1 untuk jawaban “Sangat Tidak Setuju (STS)”, Skor 2 untuk jawaban “Tidak Setuju” (TS), Skor 3 untuk jawaban “Netral (N)”, Skor 4 untuk jawaban “Setuju (S)”, dan Skor 5 untuk jawaban “Sangat Setuju (SS)”.

Sumber data dan responden

Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer, dimana data langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008:193). Data primer yang diperoleh penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Responden penelitian ini adalah aparatur pengelola dana desa di Kecamatan Grogol meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang bekerja di Kantor Desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dimana jumlah sampel berdasarkan metode *purposive sampling* adalah sebanyak 40 sampel. Menurut Sugiyono (2008:122), metode *purposive* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan kriteria tertentu. Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah: (1) Aparatur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa yang bekerja di Kantor Desa Kecamatan Grogol; (2) memiliki masa kerja minimal 6 bulan; dan (3) berpendidikan minimal SMA/K Sederajat.

Model penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD), Kompetensi Aparatur Desa

(KAD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), dan Partisipasi Masyarakat (PM) dimana model regresi penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.

$$APDD = \alpha + \beta KAD + \beta SPI + \beta PTI + \beta PM + e$$

Pengujian validitas dan reliabilitas

Penelitian ini menggunakan uji *Pearson Correlation* dalam menguji validitas instrumen penelitian dengan tingkat signifikansi 0,05 pada uji 2 sisi, dimana jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid, dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2014:51). Selain itu, penelitian ini melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi jawaban dari kuesioner responden apakah reliabel atau tidak, dimana jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$ maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel (Priyatno, 2014:64).

Uji asumsi klasik

Penelitian ini menggunakan uji normalitas untuk menguji apakah model regresi memiliki *residual error* yang terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dimana apabila koefisien K-S memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *residual error* model terdistribusi normal (Ghozali, 2011:164). Penelitian ini juga menggunakan uji multikolinearitas untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Nilai pisah batas (*cut off*) yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) ≤ 10 (Ghozali, 2011:105-106). Penelitian ini juga mendeteksi masalah heteroskedastisitas dengan menggunakan uji koefisien korelasi *Spearman's rho* (ρ), yaitu mengorelasikan variabel independen dengan *residual error* dari model regresi dimana jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 2014:108).

Uji F dan uji t

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau kelayakan model. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05, dimana jika nilai F memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka model regresi dapat dinyatakan layak (Priyatno, 2014:157). Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2014:161). Penelitian ini menggunakan uji t untuk menguji hipotesis dimana jika koefisien variabel independen memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 terhadap variabel dependen maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima.

Koefisien korelasi dan determinasi

Nilai korelasi (R) yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1 dimana jika nilai korelasi semakin mendekati 1 maka hubungan variabel semakin kuat dan begitu sebaliknya (Priyatno, 2014:155). Koefisien determinasi dilihat dari nilai korelasi disesuaikan (*Adjusted R²*) yang bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan model variabel dependen (Priyatno, 2014:156).

Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dari penelitian ini adalah aparatur desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, dengan lingkup sampel penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan. Kuesioner disebar kepada 42 responden (14 Kantor Desa x 3 Orang Aparatur Desa) dan dari jumlah kuesioner yang disebar

tersebut sebanyak 42 buah atau 100% berhasil dikumpulkan kembali. Berdasarkan kriteria sampel, terdapat 2 kuesioner atau sebesar 5% dari 42 kuesioner yang tidak memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut sehingga total data yang dapat dianalisis lebih lanjut adalah sebanyak 40 kuesioner atau sebesar 95%. Tabel 1 menunjukkan demografi responden yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian ini.

Tabel 1. Demografi responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
<i>Tingkat pendidikan</i>		
SMA	14	35%
S1	17	42,5%
Lainnya	9	22,5%
Jumlah	40	100%
<i>Lama Bekerja</i>		
6 - 12 Bulan	3	7,5%
1 - 5 Tahun	17	42,5%
6 - 10 Tahun	9	22,5%
> 10 Tahun	11	27,5%
Jumlah	40	100%
<i>Jabatan</i>		
Kepala Desa	13	32,5%
Sekretaris Desa	13	32,5%
Kaur Keuangan	14	35%
Jumlah	40	100%

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif yang berasal dari jumlah jawaban pernyataan pada kuesioner yang diisi oleh responden. Tabel 2 menunjukkan bahwa Variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 74,15 dengan standar deviasi sebesar 4,29, nilai minimum sebesar 62, dan nilai maksimum sebesar 83. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 60,33 dengan standar deviasi sebesar 3,94, nilai minimum sebesar 52, dan nilai maksimum sebesar 68. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30,13 dengan standar deviasi sebesar 2,82, nilai minimum sebesar 24, dan nilai maksimum sebesar 35. Variabel Partisipasi Masyarakat (X4) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 37,30 dengan standar deviasi sebesar 3,80, nilai minimum sebesar 28, dan nilai maksimum sebesar 43. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 35,60 dengan standar deviasi sebesar 2,69, nilai minimum sebesar 28, dan nilai maksimum sebesar 40.

Tabel 2. Statistik deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
KAD	40	62,00	83,00	74,15	4,29
SPI	40	52,00	68,00	60,33	3,94
PTI	40	24,00	35,00	30,13	2,82
PM	40	28,00	43,00	37,30	3,80
APDD	40	28,00	40,00	35,60	2,69

Tabel 3 menunjukkan bahwa r_{tabel} sebesar 0,312 dan pernyataan pada semua variabel ini yang menunjukkan nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel} sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari semua variabel penelitian adalah valid.

Tabel 3. Hasil uji validitas

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1_1	0,373	0,312	Valid
X1_2	0,560	0,312	Valid
X1_3	0,470	0,312	Valid
X1_4	0,439	0,312	Valid
X1_5	0,523	0,312	Valid
X1_6	0,563	0,312	Valid
X1_7	0,395	0,312	Valid
X1_8	0,529	0,312	Valid
X1_9	0,370	0,312	Valid
X1_10	0,539	0,312	Valid
X1_11	0,399	0,312	Valid
X1_12	0,330	0,312	Valid
X1_13	0,701	0,312	Valid
X1_14	0,642	0,312	Valid
X1_15	0,389	0,312	Valid
X1_16	0,348	0,312	Valid
X1_17	0,508	0,312	Valid
X2_1	0,430	0,312	Valid
X2_2	0,522	0,312	Valid
X2_3	0,426	0,312	Valid
X2_4	0,661	0,312	Valid
X2_5	0,371	0,312	Valid
X2_6	0,554	0,312	Valid
X2_7	0,529	0,312	Valid
X2_8	0,586	0,312	Valid
X2_9	0,571	0,312	Valid
X2_10	0,374	0,312	Valid
X2_11	0,489	0,312	Valid
X2_12	0,444	0,312	Valid
X2_13	0,397	0,312	Valid
X2_14	0,527	0,312	Valid
X3_1	0,519	0,312	Valid
X3_2	0,451	0,312	Valid
X3_3	0,743	0,312	Valid
X3_4	0,838	0,312	Valid
X3_5	0,676	0,312	Valid
X3_6	0,723	0,312	Valid
X3_7	0,651	0,312	Valid
X4_1	0,560	0,312	Valid
X4_2	0,847	0,312	Valid
X4_3	0,737	0,312	Valid
X4_4	0,626	0,312	Valid
X4_5	0,514	0,312	Valid
X4_6	0,537	0,312	Valid
X4_7	0,742	0,312	Valid
X4_8	0,700	0,312	Valid
X4_9	0,600	0,312	Valid
Y_1	0,502	0,312	Valid
Y_2	0,706	0,312	Valid
Y_3	0,760	0,312	Valid
Y_4	0,685	0,312	Valid
Y_5	0,689	0,312	Valid
Y_6	0,654	0,312	Valid
Y_7	0,644	0,312	Valid
Y_8	0,358	0,312	Valid

Tabel 4 menunjukkan bahwa semua item pernyataan kuesioner dari setiap variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item variabel kuesioner dinyatakan reliabel.

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach' Alpha</i>	Keterangan
KAD	0,785	Reliabel
SPI	0,762	Reliabel
PTI	0,770	Reliabel
PM	0,834	Reliabel
APDD	0,781	Reliabel

Tabel 5 menunjukkan persamaan penelitian ini berdasarkan hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut.

$$APDD = 6,917 + 0,337KAD - 0,119SPI + 0,090PTI + 0,220PM + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi maka implikasi manajerial penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) peningkatan kompetensi aparatur desa cenderung meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa; (b) peningkatan sistem pengendalian internal cenderung mengurangi akuntabilitas pengelolaan dana desa; (c) peningkatan pemanfaatan teknologi informasi cenderung meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa; dan (d) peningkatan partisipasi masyarakat cenderung meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa variabel kompetensi aparatur desa (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,988 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,030 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 sehingga penelitian ini menerima hipotesis pertama (H1) dalam arti bahwa kompetensi aparatur desa signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1,070 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar -2,030 dengan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga penelitian ini menolak hipotesis kedua (H2) dalam arti bahwa sistem pengendalian internal tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,516 yang lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,030 dengan tingkat

signifikansi lebih dari 0,05 sehingga penelitian ini menolak hipotesis ketiga (H3) dalam arti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel partisipasi masyarakat (X4) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,126 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,030 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 sehingga penelitian ini menerima hipotesis keempat (H4) dalam arti bahwa partisipasi masyarakat signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu $9,484 > 2,641$ dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah layak atau baik. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R adalah sebesar 0,721 yang dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini memiliki hubungan yang kuat. Selain itu, Tabel 5 juga menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R*² adalah sebesar 0,465 atau 46,5% yang berarti bahwa kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi dapat menjelaskan model akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 46,5%, dan sebesar 53,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan uji *Kologorov-Smirnov* menunjukkan bahwa koefisien nilai uji atas *unstandardized residual* adalah sebesar 0,135 dengan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 atau $0,062 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *residual error* atas data yang diteliti adalah berdistribusi normal. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada semua variabel independen memiliki nilai yang lebih dari 0,1 dengan nilai VIF kurang dari 10 sehingga hal ini membuktikan bahwa pada semua variabel independen tidak mengalami gejala multikolinieritas atau tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Tabel 5 menunjukkan bahwa korelasi antara semua variabel independen dengan *unstandardized residual* memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa

varians *residual error* data tidak terjadi efek heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil uji hipotesis

Variabel	Koefisien (β)	Koefisien Spearman (ρ)	VIF
Konstanta	6,917		
KAD	0,337*	-0,065	2,359
SPI	-0,119	0,007	1,626
PTI	0,090	0,053	2,454
PM	0,220*	0,012	1,559
Uji F	9,484*		
R	0,721		
R ² Adjusted	0,465		
Kolmogorov-Smirnov	0,135		

Variabel dependen adalah APDD. *menunjukkan signifikansi pada tingkat 5%.

Pembahasan

Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,988 > 2,030$ dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa H1 diterima atau kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tingginya tingkat kemampuan kompetensi pada aparatur desa maka akan meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu mengelola dana desa dengan baik. Tingginya kompetensi aparatur desa dapat berasal dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh aparatur desa. Selain itu, kompetensi juga dibentuk melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melatih aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Melalui upaya ini maka kompetensi aparatur desa akan meningkat dan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiana et al. (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), Aulia et al. (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa maupun kompetensi aparatur pengelola dana desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu sebesar $-1,070 > -2,030$ dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hal

ini dapat diartikan bahwa H2 ditolak atau sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dapat menyebabkan kurang optimalnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dapat disebabkan karena kurangnya jumlah tim pengendalian internal dalam lingkup pemerintahan desa. Belum optimalnya tanggungjawab para aparatur desa dapat mempengaruhi pengendalian internal atas laporan keuangan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah dan Pramuka (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pengelolaan dana desa. Hal ini cenderung terjadi karena tim pengendalian internal dari perangkat desa dan masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang laporan keuangan sehingga pengendalian atas dana yang masuk dan dana yang keluar masih dilaksanakan secara sederhana. Namun jika adanya komitmen dan tanggungjawab yang baik pada pengendalian internal dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan membaik.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu sebesar $0,516 < 2,030$ dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa H3 ditolak atau pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia et al. (2018), dan Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dapat disebabkan oleh kurangnya perangkat pengolah laporan keuangan atau perangkat

komputer yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengolah dan melaporkan laporan keuangan dana desa. Selain dapat digunakan untuk mengolah laporan keuangan dana desa, pemanfaatan teknologi sangat penting bagi aparatur desa karena dapat digunakan untuk mengirimkan segala informasi keuangan pada pihak Pemerintah Daerah. Teknologi informasi merupakan faktor yang penting bagi semua orang dalam memudahkan pekerjaannya sehingga kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa. Pengolahan laporan keuangan dana desa akan memiliki efisiensi waktu, akurat, dan semakin transparan jika memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu sebesar $2,126 > 2,030$ dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa H4 diterima atau partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang baik dapat menyebabkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang semakin baik. Transparansi dari para aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa akan memudahkan aparatur desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan pembangunan di desa akan semakin baik karena bantuan dari masyarakat. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan dampak mengurangi tindak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019), Aulia et al. (2018), Umaira dan Adnan (2019), dan Wafirotin dan Septivastuti (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang ada di 14 Kantor Desa pada Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa. Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tetapi sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Implikasi teoritis dari penelitian ini dalam konteks teori *stewardship* adalah bahwa aparatur desa dapat melaksanakan pengelolaan dana desa yang baik untuk kepentingan masyarakat desa melalui peningkatan kompetensi yang baik serta pelibatan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa. Bukti empiris pada penelitian ini terbatas pada 14 Kantor Desa yang ada pada Kecamatan Grogol di Kabupaten Sukoharjo.

Saran

Penelitian ini menyarankan agar penelitian lanjutan dapat memperluas sampel wilayah agar bukti empiris dapat digeneralisasikan pada wilayah lainnya. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden. Penelitian ini juga sangat menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel penelitian ini serta mengembangkan variabel lain yang relevan dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Ketersediaan data

Data penelitian ini dapat diakses secara terbuka pada dokumen pendukung artikel (*supplementary file*) dan Repositori Ilmiah

Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (RIN-LIPI) dengan link <https://hdl.handle.net/20.500.12690/RIN/XJZER4>

Daftar pustaka

- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 10(1), 14-25. <http://dx.doi.org/10.36694/jimat.v10i1.182>
- Aulia, P., Agusti, R., & Julita (2018). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis)*, 1(1), 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21729>
- Budiana, D. A., Said, D., & Nursini. (2019). The effect of village device competencies and internal control system on accountability of village management. *Scientific Research Journal*, VII(1), 10-20. www.sciri.org/jan-2019-paper.php?rp=P0119599
- Dewi, N. K., & Gayatri. (2019). Faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269-1298. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and stakeholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-66. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hery. (2014). Pengendalian akuntansi dan manajemen. Indonesia: Kencana.
- Kaihatu, T. (2006). Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia. *Journal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 1-9. <http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/16505>
- Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., & Adiputra, I. M. P. (2019). Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah studi interpretif pada organisasi publik non pemerintahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Undiksha*, 2(1), 1-12. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2253>
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEB)*, 19(4), 1-12. <http://www.ip.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1104>

- Noor, J. (2017). Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah. Jakarta: Kencana.
- Noordiawan. (2006). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuryanto, H. (2012). Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- Priyatno, D. (2014). SPSS 22 pengolahan data terpraktis. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis faktor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice (PROCEEDINGS)*, 580-590. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8578>
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2017). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana.
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 471-481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wafirotn, K. Z., & Septivastuti, U. (2019). The effect of transparency, community participation, and accountability on management of village funds in Ponorogo Regency. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31-44. <https://doi.org/10.24269/EKUILIBRIUM.V14I1.1527>
- Warsita, B. (2008). Teknologi pembelajaran: Landasan dan aplikasinya. Jakarta: Rineka.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1-20. <http://dx.doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>